

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

Achmad Yulianto, dan Fajar Mukti, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta

Ali, Mahrus, Mohammad, Hilipito, Rahmawaty, Meyrinda, Asy'ari, 2013, "*Model dan Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Undang-Undang (studi Putusan Tahun 2003-2012)*", Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi Kepaniteraan dan Sekteriat Jendral Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jakarta

Ashiddiqie, Jimly, 2006, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta.

Atmasasmita, Romli, 2013, "*Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*", Kencana, Jakarta.

Ginsburg, Tom, 2003, *Judicial Review in New Democracies: Constitutional Court in Asia Case*, Cambidge University Press, Cambridge.

Harahap, Yahya, M, 1988, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP*, Pustaka Kartini, Jakarta.

Huda, Ni'matul 2018, "*Kekuatan eksekutorial Putusan Mahkamah Konstitusi*", FHUII.

Ishaq, H, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*, 2017, ALFABETA, Bandung.

Isra, Saldi, 2022, *Lembaga Negara: Konsep, Sejarah, Wewenang, dan Dinamika Konstitusional*, Raja Grafindo, Depok

Majudji, Sri, dan Soekanto, Soerjono, 1995, *Penelitian Hukum Normatif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Marzuki, Mahmud, Peter, 2007, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

Mochtar, Arifin, Zainal 2021, *Kekuasaan Kehakiman (Mahkamah Konstitusi dan Diskursus Judicial Activism vs Judicial Resraint)*, Raja Grafindo Persada, Depok.

Muhammad, Rusli, 2023, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Buku Litera, Yogyakarta.

Pangaribuan, A, M, Aristo dkk, 2020, "*Pengantar Hukum Acara Pidana Di Indonesia*", Rajagrafindo Persada, Depok.

Packer, L, Herbert, 1968, *“The Limits Of The Criminal Sanction”*, Stanford University Press, California,

Soetjipto Raharjo, 2003, *“Ilmu Hukum”*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung

Siahaan, Maruarar, 2019, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.

Soekanto, Soerjono, 2007, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta.

Sriwidodo, Joko, 2020, *“Perkembangan Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia”*, Kepel Press, Yogyakarta,

Sudrajat, Tedi, 2020, *Perlindungan Hukum Terhadap Tindakan Pemerintahan*, Sinar Grafika, Jakarta.

Sumardjono, SW, Maria, 2021, *Bahan Kuliah Metodologi Penelitian Ilmu Hukum*, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Suhartoyo, 2023, *Kompilasi dan Abstrak Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi KUHP, KUHP, dan Tindak Pidana di Luar KUHP*, Konstitusi Press, Jakarta

Wicaksono, Agung, Dian, dan Rahman, Faiz, 2022, *“Putusan Bersyarat Oleh Mahkamah Konstitusi Karakteristik dan Dinamika Perkembangannya”*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta

Wibowo, Tri, Kurniawan, 2022, *Reformasi Hukum Acara Pidana Di Indonesia Berdasarkan Sistem Adversarial*, Papas Sinar Sinanti, Jakarta.

Wibowo, Tri, Kurniawan, 2020, *Hukum Acara Pidana Menggugat Kelemahan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Papas Sinar Sinanti, Jakarta

B. ANTOLOGI

Safa’at, Ali, M, *et al.*, 2019, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi (Edisi Revisi)*, Kepaniteraan dan Sekretariat Jendral Mahkamah Konstitusi, Jakarta.

C. ARTIKEL JURNAL

Akbar, Fatahillah, Muhammad “Pengaruh Putusan Mahkamah Konstitusi di Bidang Pengujian Undang-Undang terhadap Sistem Peradilan Pidana Indonesia dengan Perubahan KUHP”, *Jurnal Konstitusi*, Volume 16, Nomor 3, September 2019.

Barama, Michael “Model Sistem Peradilan Pidana Dalam Perkembangan”, *Vol.III/No.8/Januari-Juni /2016 Jurnal Ilmu Hukum*.

Isra, Saldi, "Peran Mahkamah Konstitusi dalam Penguatan Hak Asasi Manusia Di Indonesia", *Jurnal Konstitusi, Volume 11, Nomor 3, September 2014*.

Gunarto, Priyo, Marcus, "Faktor Historis, Sosiologis, Politis, Dan Yuridis Dalam Penyusunan RUU HAP", *Mimbar Hukum Volume 25, Nomor 1, Februari 2013*.

Hamaminata, Gani, "Perkembangan Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia", *Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial (JHPIS) Vol.2, No.4 Desember 2023*

Laksono, Fajar dkk, Implikasi dan Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-X/2012 tentang SBI atau RSBI, *Jurnal Konstitusi, Volume 10, Nomor 4, Desember 2013*

Teslatu, Menoha, Christy, Leo, "Penetapan Tersangka Sebagai Objek Praperadilan Dalam Putusan Mk No. 21/Puu/Xii/2014 Sebagai Pemenuhan Ham Dan Tercapainya Sistem Peradilan Pidana Terpadu", *Jurnal Ilmu Hukum Alethea [Vol. 2, No. 2, 2019]*.

Pangaribuan, Aristo, "The Dynamics of The Legislative Process of The Indonesian Criminal Procedure: Unpacking the Authoritarian Legacies and Its Future", *Asian Journal of Comparative Law, issue 20.1*.

Pangaribuan, Aristo, "Navigating an Authoritarian Landscape: Criminal Procedure and Defence Lawyers in Indonesia", *Australian Journal of Asian Law, 2025, Vol 25 No 2, Article 04: 63-84*.

Wicaksono, Agung, Dian, dan Faiz, Rahman, "Eksistensi dan Karakteristik Putusan Bersyarat Mahkamah Konstitusi", *Jurnal Konstitusi, Volume 13, Nomor 2, Juni 2016*.

D. MAKALAH

Eddyono, Widodo, Supriyadi, 2017, *Kompilasi Putusan Mahkamah Konstitusi dan Perubahan Kitab Hukum Acara Pidana (KUHAP) Indonesia*, Institute for Criminal Justice Reform, Jakarta

Dollu, Yaferson, Daud, 2019, *Gugurnya Praperadilan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102/Puu-Xiii/2015*, Universitas Gadjah Mada, sebuah Tesis yang dipublikasikan dalam etd lib ugm.

Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, 2025, Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Hukum Acara Pidana.

E. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi Menjadi Undang-Undang yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali Dalam Perkara Pidana.

Surat Edaran Mahkamah Agung No. 5 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2021 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan.

F. PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Putusan MK No. 65/PUU-VIII/2010

Putusan MK No. 65/PUU-IX/2011

Putusan MK No. 98/PUU-X/2012

Putusan MK No. 114/PUU-X/2012

Putusan MK No. 3/PUU-XI/2013

Putusan MK No. 34/PUU-XI/2013

Putusan MK No. 21/PUU-XII/2014

Putusan MK No. 102/PUU-XIII/2015

Putusan MK No. 130/PUU-XIII/2015

Putusan MK No. 33/PUU-XIV/2016

Putusan MK No. 103/PUU-XIV/2016

Putusan MK No. 28/PUU-XX/2022

G. PUTUSAN PERADILAN PIDANA

Putusan Pengadilan Negeri Parepare No. 77/Pid.B/2024/PN Pre

Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2024/PN Jkt.Sel

Putusan Praperadilan Nomor 24/Pid.Pra/2025/PN Jkt.Sel

Putusan Nomor 34/Pid.Pra/2020/PN Sby